



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonom merupakan kemampuan negara untuk meningkatkan dan mempertahankan Produk Domestik Bruto antara 5-7% pertahun (Arsyad, 1999). Terjadinya pertumbuhan ekonomi karena peningkatan produksi barang dan jasa baik secara kualitas maupun kuantitas. Terjadinya pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan adanya investasi utamanya dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Investasi merupakan modal di masa mendatang yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penambahan produksi dan pendapatan (Limam, 2015). Di Indonesia, Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan rata-rata 5% pertahun berdasarkan hasil RPJMN tahun 2015-2018 diperoleh dengan adanya dukungan kebijakan reformasi struktural antara lain dalam perubahan iklim investasi.

Investasi masuk sebagai salah satu pilar utama yang dikemukakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap IV tahun 2020-2024. Dalam upaya untuk mencapainya terdapat kebijakan yang perlu untuk dikembangkan yaitu kualitas investasi dan peningkatan inovasi. Kegiatan ini adalah modal penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkat, dan sejahtera secara adil dan merata. Perubahan iklim

investasi ini didukung pula dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan investasi.

Dukungan pembangunan dan pengembangan ekonomi sangat diperlukan modal yang besar dari dalam negeri dengan menarik para investor asing untuk berinvestasi. Target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Undang-undang ini diciptakan untuk mengatur tentang lapangan kerja baru dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kebijakan yang ada, pemerintah berupaya untuk menarik investor masuk ke Indonesia karena telah diberikan payung hukum yang jelas untuk berinvestasi. Investor asing dapat mendirikan perusahaan di Indonesia dengan kebijakan investasi ini. Mereka mampu berinvestasi sebanyak 95% dari seluruh modal (Suharto, 2017).

Perekonomian Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat besar dari investasi asing. Investasi asing dapat dilakukan melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) atau dinamakan dengan Penanaman Modal Asing (PMA). PMA bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas karena mempromosikan perusahaan penerimannya melalui praktik bisnis, manajemen, sistem, dan kecanggihan teknologi, serta membuka akses sebagai penghubung ke pasar ekspor dan rantai pasokan global (Sanusi dkk, 2019).

Mengutip dari Sanusi dkk (2019), tingkat investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu 1) perkiraan perolehan tingkat keuntungan; 2) tingkat suku bunga; 3) perkiraan keadaan ekonomi di masa mendatang; 4) kecanggihan teknologi; 5) tingkat pendapatan nasional dan perubahannya; 6) perolehan keuntungan perusahaan (Sukirno, 2013). Selain itu pendorong untuk masuknya investasi merupakan sasaran strategis yang terkait kesempatan dalam mengadakan bisnis yang dirasa memberikan keuntungan dan efisien dalam penggunaan modal. Kemudian terdapat pertimbangan lain untuk masuknya investasi yaitu aspek manfaat yang meliputi sumberdaya manusia, jangkauan pasar, aktivitas operasional, akses aksesibilitas, dan properti. Hal lainnya di lihat juga dari aspek resiko yang meliputi risiko ekonomi, politik, lingkungan dan keamanan. Selanjutnya investor juga mempertimbangkan aspek biaya untuk perpajakan, tenaga kerja, biaya yang terkait dengan properti, dan paket insentif (Sanusi dkk, 2019).

Dalam mendukung percepatan investasi di Indonesia, Jawa Tengah memiliki pusat perkembangan industri yang dikenal dengan Kawasan Industri (KI) dan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nompr 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Melalui PP tersebut telah diatur bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Kendal memiliki luas 1.000 ha yang terletak diwilayah Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong. Kemudian PP ini dalam pasal 4 menyampaikan

bahwa KEK Kendal merupakan zona logistik, zona pengolahan ekspor, dan zona industri.

Tidak dapat dipungkiri karena keberadaan KEK, Kabupaten Kendal menjadi daerah yang berpotensi besar untuk menarik investor dan meningkatkan bisnis. Muhandis dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke KEK Kendal, menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan Kawasan Industri lainnya, kelebihan KEK Kabupaten Kendal lebih menguntungkan karena statusnya sebagai Kawasan Ekonomi khusus. Kemudahan dan fasilitas yang diterima merupakan keuntungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik berupa fasilitas fiskal dan non fiskal (Priskilla, 2024).

Dengan ditetapkannya KEK di Kabupaten Kendal, potensi investasi meningkat utamanya dalam bidang industri. Berkaitan dengan hal tersebut perlu usaha bagi pemerintah daerah untuk menggaet investor agar masuk dan menanamkan investasinya di wilayah tersebut. Untuk mendukung berkembangnya KEK Kendal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi. Tujuan adanya peraturan tersebut merupakan salah satu strateginya yaitu mempercepat proses perijinan. Hal ini digambarkan karena berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 tepatnya di tahun 2020 ditemukan bahwa peta potensi investasi Kabupaten Kendal mendapatkan nilai sangat rendah. Hal ini terjadi karena program penyiapan

potensi sumberdaya, sarana dan prasarana dinilai kurang sehingga indikator tersebut tidak tercapai.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aulia Zul Thirafi (2013) dikemukakan bahwa penanaman modal asing di Kabupaten Kendal sangat dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, selain itu penanaman modal asing di Kabupaten Kendal tidak terpengaruh secara signifikan oleh variabel seperti ketersediaan tenaga kerja dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diperkuat dengan Lu Sudirman dan Wisnu Yuwono (2016) menyatakan bahwa FDI tidak dipengaruhi oleh insentif pajak (insentif fiskal), kebebasan ekonomi, atau sumber daya manusia, melainkan yang berpengaruh adalah skala dan ukuran kegiatan perekonomian di negara tujuan.

Guna meningkatkan daya tarik investasi, pada tahun 2018 Jawa Tengah menjadi tujuan investasi tertinggi, sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Kendal untuk mendorong investor melakukan investasi di Kabupaten Kendal. Keadaan dan stabilitas nasional, terutama penurunan suku bunga kredit dan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, telah mendorong minat investasi di Kabupaten Kendal. Namun terdapat tantangan bagi Kabupaten Kendal yaitu otonomi daerah yang telah berkembang di era globalisasi, menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah harus berkompetisi untuk mempercepat perekonomian daerah dan mendorong investasi yang mampu menyejahterakan rakyat.

Menangkap kondisi yang ada, maka penelitian ini akan berfokus pada strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penarikan

investor untuk meningkatkan investasi asing di Kabupaten Kendal. Penelitian ini akan didasarkan pada kajian kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah serta kebijakan Kabupaten Kendal guna mengetahui peluang untuk meningkatkan investasi asing di Kabupaten Kendal.

Dengan data yang telah dijabarkan, dalam penelitian ini fakta-fakta tentang kebijakan dan pendekatan kerja sama yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal disajikan melalui metode deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pembuatan rekomendasi kebijakan dalam bentuk *policy brief* untuk meningkatkan proses investasi berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Kendal dalam ranah internasional.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Bagaimana upaya daerah dalam peningkatan penanaman modal asing di Kabupaten Kendal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan riset ini terbagi menjadi dua bagian, yang akan dipaparkan secara detail di bawah ini:

### **1.3.1 Tujuan umum**

Menganalisis upaya kebijakan daerah dalam peningkatan investasi asing di Kabupaten Kendal.

### 1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari riset ini yakni:

1. Menganalisis upaya daerah dalam meningkatkan investasi asing dan penanaman modal asing di Kabupaten Kendal.
2. Menganalisis upaya daerah yang terpenuhi dalam peningkatan penanaman modal asing di Kabupaten Kendal

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat akademis dan praktis sebagai dua kategori manfaat dari riset ini.

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Berdasarkan manfaat akademis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu politik dalam pelaksanaan kebijakan investasi daerah dalam menarik investor asing. Selanjutnya sumber atau acuan informasi untuk penelitian lanjutan terkait penelitian sejenis berdasarkan hasil penelitian ini.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan singkat dalam sistem *policy brief* untuk meningkatkan peran *Government to Business* dalam menarik investasi internasional sehingga dapat menjadi rujukan daerah lain. Untuk masyarakat dan pengusaha, penelitian ini dapat memberikan pencerahan berkaitan dengan keterbukaan akses informasi utamanya bisnis dan investasi di daerah Kabupaten Kendal.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

Terkait dengan upaya peningkatan investasi di daerah, riset ini dalam penulisannya didasarkan pada sejumlah penelitian sebelumnya. “*Consumer switching behavior to an augmented reality (AR) beauty product application: Push-pull mooring theory framework*” adalah penelitian pertama yang dilakukan oleh Aditya Nugroho dan Wei-Tsong Wang. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengaruh teori *push-pull-mooring* pada perilaku *switching* paling baik didefinisikan secara teoritis dan empiris dalam karya ini. Teori tambatan dorong-tarik telah dipelajari secara ekstensif dalam literatur untuk memeriksa perpindahan konsumen di antara metode yang berbeda (Fu et al., 2021; Handarkho & Harjoseputro, 2019; Lai et al., 2012). Teori PPM dan hubungannya dengan risiko kinerja yang dirasakan, bagaimanapun, belum mendapat banyak perhatian. Penelitian ini menemukan risiko kinerja yang dirasakan sebagai variabel kritis yang mempengaruhi perilaku peralihan konsumen. Seiring meningkatnya risiko yang dirasakan, konsumen enggan beralih dari belanja *offline* ke *online* menggunakan teknologi *Augmented Reality* (AR). Oleh karena itu, kegiatan mitigasi risiko harus dilakukan. Studi ini menunjukkan bahwa kegunaan media, kenikmatan yang dirasakan, keinformatifan yang dirasakan, afektif komitmen, dan kewanaman yang dirasakan adalah faktor kunci yang menurunkan risiko kinerja teknologi AR.

*"Solar for renters: Investigating investor perspectives of barriers and policies"* adalah penelitian kedua yang dilakukan Hammerle dan rekannya pada tahun 2023. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu intervensi kebijakan yang berusaha untuk memperbaiki pengecualian properti sewaan dari PV surya menghadapi keseimbangan yang rumit baik dalam persepsi maupun dampak: menciptakan manfaat bagi penyewa, yang mungkin khawatir harus membayar sewa lebih tinggi (Zander, 2020), tanpa terlalu menguntungkan properti investor yang relatif kaya. Mencapai keseimbangan dengan kebijakan yang efektif dan adil membutuhkan pemahaman yang baik tentang hambatan yang dirasakan pemangku kepentingan dan intervensi yang diinginkan. Studi kami berkontribusi terhadap hal ini dengan menjelaskan perspektif investor properti melalui dua survei di seluruh Australia. Berdasarkan koefisien dari BWS dan DCE, implikasi kebijakan inti dari penelitian kami adalah bahwa kebijakan yang berfokus terutama pada penanganan biaya awal yang tinggi (seperti yang telah digunakan secara historis) kemungkinan besar akan terjadi.

Penelitian Edmund J. Malesky (2004) Setelah mempertimbangkan geografi, infrastruktur, dan budaya provinsi, investasi asing langsung (FDI) membantu menjelaskan perbedaan tata kelola perekonomian provinsi. Secara umum, penanaman modal asing mempunyai dampak positif terhadap tata kelola. Peneliti mengembangkan analisis dalam empat langkah. Institute of Southeast Asian Studies, Singapura Pertama, peneliti mengulas penelitian sebelumnya mengenai tata kelola perekonomian provinsi. Kedua, melihat saluran pengaruh

FDI terhadap pemerintah provinsi. Ketiga, mengeksplorasi seberapa besar aliran masuk FDI dapat mengubah hubungan hukum, memperkuat hubungan antara DPI dan Komite Rakyat, serta membatasi jangkauan lembaga-lembaga pusat. Terakhir, menggunakan studi kasus mikro di empat provinsi di berbagai tingkatan untuk menguji teori. Faktor penting yang menyebabkan perbedaan yang lebih besar dalam aliran FDI antar provinsi adalah Keputusan 852/TTg pada bulan Januari 1996, yang menempatkan prosedur FDI di bawah wewenang lembaga-lembaga provinsi. Perencanaan penanaman modal asing berbeda-beda di setiap provinsi dan menimbulkan rasa frustrasi di kalangan investor. Idenya adalah untuk membuat perencanaan provinsi menjadi seragam. Perubahan besar kedua adalah keputusan pemerintah pusat yang mengizinkan provinsi dan kota untuk menandatangani proyek FDI secara langsung. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa penanaman modal asing berkorelasi positif dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan skor indikator pembangunan manusia. Investor belum mengenal pemerintahan provinsi di luar Kota Ho Chi Minh, Hanoi, dan Dong Nai. Para pemimpin di tingkat provinsi hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai perubahan tata kelola yang mungkin menarik bagi investor atau pilihan kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun seiring berjalannya waktu, para pejabat di tingkat provinsi mulai menyadari bahwa perubahan tata kelola tertentu akan menarik investor.

Dalam ilmu politik komparatif, semakin banyak literatur mengenai federalisme yang menjaga pasar telah mengeksplorasi faktor-faktor “penarik” ini

di negara-negara yang beragam seperti Amerika Serikat, Jerman, dan lain-lain. Tiongkok, Meksiko, Rusia, dan India. Gagasan dasar federalisme yang melestarikan pasar adalah bahwa persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja dan investasi antar provinsi dalam sistem desentralisasi menciptakan insentif bagi reformasi ekonomi dan peningkatan kinerja di tingkat provinsi. Meskipun ada upaya dari pemerintah provinsi, pemerintah di Hanoi untuk membatasi persaingan antar provinsi, banyak pemimpin daerah di provinsi dengan pertumbuhan tinggi menyadari kebijakan insentif khusus dari pesaing mereka (*chinh sach uu dai*) dan telah mengambil langkah- langkah untuk menjadikan provinsi mereka lebih menarik bagi peneliti karena telah menunjukkan bahwa FDI dikaitkan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan secara perlahan dan variasi dalam indikator sosial ekonomi antar provinsi di Vietnam. Liburan pajak dan lahan yang lebih murah hanyalah dua cara untuk bersaing. Provinsi juga menurunkan biaya transaksi dan memperbaiki lingkungan investasi. Hubungan ini saling menguatkan sehingga menyebabkan kausalitas sulit diurai. Provinsi yang menarik FDI mempunyai sumber daya dan Pengaruh investor terhadap tata kelola bisa beragam. Meskipun investor yang berorientasi ekspor memerlukan perbaikan dalam tata kelola untuk menurunkan biaya transaksi dan memfasilitasi daya saing produk mereka di pasar internasional, investor yang hanya tertarik untuk mengakses pasar domestik mungkin justru akan mendorong tata kelola yang lebih buram.

Tekanan negatif seperti ini relevan jika investor domestik mencari untuk otonomi untuk meningkatkan infrastruktur dan tata kelola yang, pada gilirannya, menarik lebih banyak investor. tingginya FDI memberikan ruang bagi provinsi untuk bereksperimen dengan kebijakan ekonomi, yang merupakan saluran penguatan lainnya. Kebijakan inovatif tersebut termasuk Song Be dan Dong Nai yang mengizinkan 100 persen perusahaan pengolahan ekspor untuk memasuki kawasan industri mereka, meskipun mereka belum memiliki izin untuk membuat zona pengolahan ekspor. Melalui jalur “dorong” dan “tarik”, reputasi Binh Duong dibangun pada akhir periode 1993 hingga 1996 sebagai provinsi pertama yang menerapkan kebijakan “satu pintu, satu atap” untuk menyederhanakan pendaftaran dan perizinan usaha. Secara umum, pengaruh FDI positif. FDI tampaknya dikaitkan dengan variabel implementasi, transparansi, efisiensi, dinamisme, dan hasil provinsi yang lebih baik, meskipun hubungan ini masih jauh dari jelas. Yang lebih penting dari FDI itu sendiri adalah interaksi FDI dengan faktor geografis dan budaya. berpendapat bahwa penanaman modal asing merupakan kekuatan pendorong di balik perbedaan perekonomian di tingkat provinsi dan hal ini pada gilirannya akan meningkatkan standar hidup bagi mereka yang cukup beruntung untuk tinggal di provinsi dengan penanaman modal asing yang tinggi atau dapat pindah ke sana.

Penelitian oleh Muhammad Aulia Zul Thirafi (2013) menemukan bahwa guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, ada tiga komponen utama yang sangat penting. Pertama dan terpenting, faktor-faktor ekonomi makro,

seperti tingkat keterbukaan ekonomi, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan politik, dan persaingan pasar. Kedua, kelembagaan, seperti penegakan hukum, sistem perpajakan, dan ketegasan peraturan, sangat memengaruhi iklim investasi. Ketiga, sektor keuangan sangat penting, terutama dalam hal pasar, fleksibilitas, tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Terakhir, infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sumber listrik dan air sangat penting untuk menarik investasi dan membuat daerah lebih menarik bagi investor. Penurunan nilai investasi asing di Kabupaten Kendal adalah subjek penelitian yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Selain itu, pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Kendal sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keterlibatan daerah ini dalam program KEK menunjukkan bahwa investasi yang lebih besar diperlukan untuk mendukung inisiatif tersebut. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, investasi asing membutuhkan dukungan finansial yang besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan investasi asing di Kabupaten Kendal jika ingin menyusun rencana yang berguna dalam meningkatkan minat investor asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Kendal, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap penanaman modal asing, menurut estimasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, penanaman modal asing di Kabupaten Kendal tidak terpengaruh secara signifikan oleh kepadatan penduduk dan ketersediaan tenaga kerja. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, terutama ketersediaan jalan, adalah faktor independen yang mempengaruhi penanaman modal asing di Kabupaten Kendal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang baik untuk menarik investor asing ke Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian Muhammad Aulia Zul Thirafi (2013) bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari berbagai faktor, termasuk ketersediaan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Kendal dari tahun 1980 hingga 2010. Hasil menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PMA di Kabupaten Kendal dari tahun 1980 hingga 2010. Dalam jangka waktu yang sama, tenaga kerja yang memadai, yang diwakili oleh angkatan kerja, berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Kendal. Dari tahun 1980 hingga 2010, variabel infrastruktur, yang digambarkan oleh panjang jalan di Kabupaten Kendal dalam kategori baik, menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Kendal. Sebaliknya, variabel kepadatan penduduk menunjukkan cukup berdampak positif, tetapi kurang signifikan terhadap PMA di Kabupaten Kendal dalam periode yang sama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lu Sudirman dan Wisnu Yuwono (2016), ketersediaan infrastruktur sangat penting dalam penentuan daya saing,

pertumbuhan ekonomi, dan daya tarik investasi di suatu daerah. Infrastruktur yang baik dianggap sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas bisnis dengan melakukan kegiatan operasional dengan lebih efisien dan efektif. Mereka juga mengutip penelitian O'Meara (2015), yang menunjukkan bahwa variabel seperti kebebasan ekonomi, insentif pajak, dan sumber daya manusia (SDM) tidak memengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (FDI). Faktor yang lebih penting adalah luasnya dan luasnya aktivitas ekonomi di negara tujuan investasi. Ini menunjukkan betapa sulitnya menarik investasi asing selain infrastruktur yang baik. Faktor lain, seperti ukuran pasar dan aktivitas ekonomi juga berperan penting. Produk Domestik Bruto (GDP), inflasi, dan keterbukaan perdagangan (*trade openness*) memengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) di India, menurut penelitian yang dilakukan oleh Vagadia dan Solanki (2014), yang memanfaatkan data seri waktu dari tahun 1991 hingga 2010. Namun, nilai tukar tidak memengaruhi FDI. Mengingat betapa pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien untuk menjalankan operasi bisnis, calon investor sangat memperhatikan salah satu faktor produksi, yakni sumber daya manusia (Kusumastuti, 2008). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perkembangan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat penting untuk kesuksesan bisnis (Al Khatib et al, 2012; Zaenuddin, 2009; Petrovic dan Stankovic, 2009; Hartono dan Setyowati, 2009). Tingkat upah dan hubungan industri adalah variabel tambahan yang berpengaruh (Hartono dan Setyowati, 2009).



Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor menunjukkan keyakinan yang positif secara umum sebelum berinvestasi di Kota Batam, terutama untuk beberapa faktor. 1) Kapasitas dan keadaan jalan raya; 2) Kapasitas dan keadaan pelabuhan laut, 3) Kapasitas dan keadaan efisiensi tahapan bongkar muat di pelabuhan; 4) Pengeluaran biaya di pelabuhan; 5) Kapasitas dan keadaan bandara udara; 6) Air, gas, listrik, dan energi lainnya yang memadai; 7) Ketersediaan anggaran untuk air, gas, listrik, dan energi lainnya; 8) Pengurusan izin investasi secara efisien; 9) Kualitas pelayanan pemerintah; 10) Tenaga kerja yang tersedia; 11) Tenaga kerja produktif, 12) Payung hukum untuk melaksanakan investasi di Kota Batam; dan Keadaan ketertiban dan keamanan di daerah Batam. Meskipun demikian, keyakinan investor sebelum berinvestasi menunjukkan kondisi yang negatif untuk dua atribut lainnya: tingkat 1) Upah Minimum Kota Batam (UMK) dan 2) peran pemerintah dalam menetapkan UMK. Ini sejalan dengan tanggapan investor setelah berinvestasi, yang rata-rata menilai berbagai aspek dengan positif kecuali untuk dua atribut tersebut. Nilai sikap investor mencapai 5,4268, yang merupakan skor yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa investor belum puas dengan investasi yang dilakukan di Kota Batam. Namun, meskipun mereka belum puas, penilaian sikap investor masih positif, yang menunjukkan bahwa investor masih berharap kondisi Kota Batam akan menjadi lebih baik. Pemerintah harus berkonsentrasi pada beberapa masalah utama, seperti memberikan transparansi tentang biaya bongkar muat di pelabuhan, menentukan tingkat UMK, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah, memberikan kepastian hukum untuk

berinvestasi di Batam, serta mengefesienkan pengeluaran penyediaan gas, listrik, dan energi lainnya.

Studi yang dilakukan oleh Hendra Gunawan et al. (2020) menemukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bogor menghadapi sejumlah masalah. Pertama, batas waktu izin yang seringkali tidak tepat waktu menghambat komitmen terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun standar ISO terus diadvokasi, keluhan tentang waktu yang tidak tepat untuk produk perizinan terus muncul. Kedua, sumber daya manusia terbatas. DPMPTSP harus dilengkapi dengan karyawan teknis yang berpengalaman, seperti penilaian amdal, kesehatan, transportasi, dan sipil. Ketiga, ada ketidaksesuaian antara regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kepentingan sektoral. Selain itu, sebagian besar staf teknis masih bekerja di pekerjaan mereka sebelumnya dan bukan di DPMPTSP. Proses permohonan, validasi dokumen, pemrosesan, dan penerbitan izin adalah semua bagian dari prosedur pelayanan. Waktu penyelesaian tidak dikenakan biaya atau tarif. Penyelesaian memerlukan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal kelengkapan berkas. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah salah satu produk layanan yang disediakan. Di sisi lain, ada seksi informasi dan layanan pengaduan untuk pengaduan layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Waktu penyelesaian maksimal adalah 14 (empat belas) hari kerja, tetapi rata-rata adalah

45,2 (empat puluh lima koma dua) hari kerja. Beberapa faktor menyebabkan kondisi ini, termasuk kurangnya komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai. Selain itu, kekurangan fasilitas pendukung seperti kendaraan, komputer, printer, dan GPS juga menyebabkan proses pemrosesan izin menjadi lebih lama.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dalam penerapan proses investasi yaitu perlu adanya kemanfaatan yang diberikan untuk investor maupun penerima investasi. Penelitian yang sudah ada melalui beberapa penelitian diatas sejalan bersamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu upaya kebijakan peningkatan investasi daerah. Namun pada setiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat perbedaan antara lain strategi yang digunakan, metode yang digunakan dan lokasi penelitian. Dengan adanya perbedaan ini, penelitian ini memiliki ketertarikan untuk meneliti upaya kebijakan dalam peningkatan penanaman modal asing di Kabupaten Kendal.

## **1.6 Kerangka Teoritis**

Penelitian ini menggunakan konsep dan teori untuk menganalisis permasalahan, yakni teori investasi dan analisis implementasi kebijakan.

### **1.6.1 Teori Investasi**

Investasi merupakan pengorbanan atas sebagian sumber daya untuk memperoleh sejumlah kompensasi atau keuntungan dimasa mendatang. Investasi tidak hanya

membahas tentang keuntungan tetapi siap terjadi adanya kerugian yang dialami. Investasi disebut juga sebagai penempatan sejumlah dana dengan harapan untuk meningkatkan nilai, memelihara, atau memperoleh return positif (Sutha, 2000). Investasi sebagai tindakan menanamkan uang dengan harapan mendapatkan hasil atau nilai yang lebih meningkat (Webster, 1999).

Investasi menurut Lypsey (1997) adalah pengeluaran pada saat ini untuk barang yang tidak akan digunakan. 3 (tiga) kategori investasi meliputi: investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Kategori ini terdiri dari periode waktu yang diinvestasikan. Penggunaan waktu, masa depan yang tidak pasti, dan tingkat inflasi yang diantisipasi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi investasi. Investasi adalah proses penanaman modal di perusahaan dengan tujuan meningkatkan kekayaan perusahaan atau korporasi. Pembelian barang oleh individu atau perusahaan untuk meningkatkan persediaan modal mereka juga merupakan definisi investasi (Mankiw, 2000).

Modal yang diberikan oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain dikenal sebagai investasi asing (Griffin & Pustay, 2015, 8). Investasi asing dapat masuk ke suatu negara dalam dua kategori: investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung, juga dikenal sebagai *Foreign Direct Investment* (FDI), adalah jenis investasi yang bertujuan untuk mengontrol aset, properti, atau bisnis yang terletak di negara tuan rumah. Korporasi multinasional (MNC) adalah perusahaan yang terlibat dalam investasi asing yang memiliki atau mengendalikan aktivitas yang meningkatkan nilai di

satu atau lebih negara. Selain memiliki dan mengelola aset asing, perusahaan multinasional seringkali melakukan pembelian sumber daya di berbagai negara, melakukan proses produksi barang atau jasa di berbagai negara, dan setelahnya menjualkan barang dan jasa tersebut di berbagai negara. Jenis investasi langsung dapat meliputi:

- Pendirian cabang perusahaan di negara penerima investasi;
- Pendirian perusahaan dari negara pemberi investasi memiliki mayoritas saham; pendirian perusahaan dari negara pemberi investasi sepenuhnya membayar;
- Pendirian perusahaan dari negara pemberi investasi beroperasi secara eksklusif di negara lain; atau penempatan aset tetap perusahaan domestik dari negara pemberi investasi di negara lain (Jhigan, 2014, 483).

Tidak mengherankan bahwa terdapat sejumlah variabel yang memengaruhi keputusan bisnis untuk melakukan Penanaman Modal Langsung Asing (FDI). Hal ini disebabkan oleh kompleksitas ekonomi global dan berbagai peluang yang tersedia bagi bisnis di berbagai negara. Beberapa dari variabel ini adalah pasokan, permintaan, dan politik (Griffin & Pustay, 2015, 165).

- a. Faktor Pasokan
- b. Faktor permintaan
- c. Faktor politik

Tiga alasan utama untuk melakukan investasi, menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 1998):

- a. *Resource seeking.*
- b. *Market seeking.*
- c. *Efficiency seeking.*

Investasi portofolio asing dikenal sebagai Foreign Portfolio Investment (FPI), adalah aset keuangan asing yang dibeli seperti saham, sertifikat deposito, dan obligasi yang bertujuan di luar pengendalian. Sebuah perusahaan harus memiliki tiga jenis keunggulan jika ingin berinvestasi dalam fasilitas di luar negeri, menurut Ball et al. (2014, hlm. 102-103). Keunggulan ini termasuk keunggulan internalisasi, keunggulan kepemilikan, dan keunggulan lokasi. Keunggulan yang dapat diperoleh perusahaan melalui kepemilikan aset berwujud yang spesifik, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain dan dapat ditransfer ke luar negeri, dikenal sebagai faktor Kepemilikan Spesifik (*Ownership Specific Factor*). Karakteristik ekonomi, sosial, atau politik tertentu, seperti ukuran pasar, hambatan tarif atau non-tarif, atau biaya transportasi, disebut Faktor Lokasi Spesifik (*Location Specific Factor*). Karakteristik ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan spesifiknya dengan menjalankan operasinya di pasar daripada melayani pasar melalui ekspor. Strategi untuk memasuki pasar asing dikenal sebagai internalisasi. Ini melibatkan transaksi sesuai dengan persyaratan pasar hingga menerapkan struktur hierarki melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki.

Untuk menarik investasi asing perlu menggali proses tarik menarik yang dikenal dengan *Push-Pull Mooring* untuk menjelaskan masalah perilaku *switching*.

Penggunaan kerangka kerja PPM sangat relevan untuk memberikan wawasan mendalam dan menjelaskan masalah perilaku peralihan dalam model teoretis. Semua faktor yang digunakan dalam teori ini akan dikategorikan berdasarkan kerangka PPM, yaitu faktor pendorong, penarik, dan mooring. Menurut teori PPM, aksi tarik dan dorong berinteraksi untuk menghasilkan gerakan baru, yang dihambat oleh aksi tambatan (Chang et al., 2017).

### 1.6.2 Analisis Implementasi Kebijakan

Kebijakan tidak hanya sebagai instrumen pemerintah yang berkaitan dengan aparatur negara, melainkan juga mencakup tata kelola yang berkaitan dengan manajemen sumber daya publik. Dasar kebijakan merupakan serangkaian keputusan maupun tingkah laku dalam rangka memberikan aturan secara langsung terhadap pemanfaatan dan penyebaran sumber daya alam, manusia, dan keuangan untuk kepentingan rakyat, masyarakat, penduduk, atau warga negara. Kebijakan adalah hasil dari kerja sama, kompromi, atau hingga persaingan, antar bermacam-macam ide, ideologi, teori serta keinginan yang membentuk sistem politik suatu negara.

Menurut Carl Friedrich (1969) dalam Leo Agustino (2006:7), kebijakan merupakan sekumpulan perbuatan atau aktivitas yang dicanangkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam sebuah wilayah tertentu. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang tersedia sehingga mampu mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Dalam Edi Suharto (2007:5), Bridgeman dan Davis (2004) mengemukakan bahwa memiliki tiga

aspek yang saling berhubungan dalam kebijakan publik: tujuan, keputusan yang sah secara hukum, dan hipotesis. Kebijakan publik biasanya berfokus pada tindakan dengan tujuan, bukan perilaku yang acak atau berubah. Kebijakan publik mencakup tingkah laku yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, tidak sekadar keputusan.

Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang sebenarnya dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, dan menyediakan perumahan bagi masyarakat. Bukan hanya rencana atau niat, akibatnya kebijakan publik dapat dianggap baik atau buruk. Yang pertama melibatkan tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani masalah; yang kedua melibatkan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun, meskipun keterlibatan pemerintah sangat penting dalam situasi ini. Hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi dasar dalam kebijakan publik.

Tahap implementasi dianggap sebagai fase penting dalam siklus kebijakan dalam teori siklikal (*cyclical theory*) mengenai implementasi kebijakan. Tahap ini terjadi terutama setelah proses pembentukan kebijakan, yang melibatkan wacana hukum formal seperti undang-undang, peraturan, keputusan, atau produk kebijakan lainnya yang dianggap telah usai. Pernyataan Solichin Abdul Wahab (2012:135), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) mengenai makna implementasi yakni dengan, “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang



timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Menurut Marilee S. Grindle (1980) dalam Subarsono (2005:93), dua komponen utama memengaruhi pelaksanaan kebijakan: konteks pelaksanaannya dan konten kebijakan itu sendiri. Sementara konteks pelaksanaan mencakup kepentingan, kekuatan, dan strategi para aktor berpartisipasi, karakteristik rezim dan institusi yang berkuasa, serta tingkat ketaatan dan responsivitas kelompok sasaran. Konten kebijakan mencakup seberapa besar kepentingan dan manfaat bagi kelompok sasaran tercermin dalam kebijakan, tingkat perubahan yang diinginkan, kecocokan lokasi program, rincian implementor, dan dorongan sumber daya. Faktor lingkungan kebijakan, di sisi lain terdiri dari tiga hal. Pertama, kekuatan, strategi, dan kepentingan yang milik para pelaku yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan; kedua, karakteristik sistem dan institusi yang berlaku saat ini; dan ketiga, tingkat kepatuhan dan respons dari kelompok sasaran.

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Subarsono (2005:99), ada enam komponen yang memengaruhi kinerja implementasi. Yang pertama adalah standar dan tujuan kebijakan, yang menurut mereka harus jelas dan dapat diukur sehingga dapat dicapai secara efektif. Jika standar dan tujuan kebijakan tidak jelas, agen implementasi akan mengalami multiinterpretasi. Kedua, implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan non-manusia. Ketiga, kerjasama dan koordinasi dengan organisasi lain sangat penting dalam banyak program implementasi. Terakhir, karakteristik agen pelaksana, seperti struktur birokrasi, standar, dan pola hubungan, memengaruhi pelaksanaan program. Kelima, keadaan ekonomi, sosial, dan politik, terdiri atas sumber daya ekonomi dan lingkungan yang mendorong kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Keenam, disposisi implementor, yang mencakup: 1) respons terhadap kebijakan; 2) pemahaman kebijakan (kognisi); 3) dan tingkat preferensi nilai implementor.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Sugiyono (2015: 38) mengatakan definisi operasional adalah sifat, atribut, atau nilai dari objek atau aktivitas yang memiliki jenis tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Agar data dapat diteliti dengan benar, istilah penting harus didefinisikan berdasarkan latar belakang, kerangka pemikiran, dan definisi konseptual di atas. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan data, diperlukan perumusan definisi variabel penelitian. Dalam definisi konseptual, istilah utamanya adalah teori

investasi, sedangkan dalam definisi operasional, istilah utamanya dapat ditemukan dalam indikator-indikator berikut:

1. Teori Investasi dan Implementasi Kebijakan

Dalam teori investasi terdapat indikator yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan solusi untuk rumusan masalah. yaitu: bagaimana upaya memelihara investasi asing di daerah, kemudian bagaimana menaikkan atau memberikan return yang positif terhadap investasi asing di daerah. Sehingga dapat menganalisis isi implementasi investasi asing di Kabupaten Kendal serta bagaimana lingkungan implementasi investasi asing dapat meningkatkan investor di Kabupaten Kendal.

## **1.8 Metode Penelitian**

### 1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode deskriptif dimanfaatkan dalam penelitian berjenis kualitatif. Tujuan dari metode deskriptif untuk memberikan gambaran fakta-fakta tentang kebijakan dan kerja sama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan daerah dalam peningkatan investasi asing, peran *Foreign Direct Investment* dalam investasi Kabupaten Kendal serta bagaimana kesempatan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam melakukan kerja sama.

### 1.8.2 Ruang Lingkup Penelitian

Jangkauan penelitian adalah batasan yang ditetapkan untuk membatasi analisis dalam penelitian (Akunto, 1989). Guna menghindari pemberian penjelasan yang terlalu luas tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dalam mendorong investasi asing, penelitian ini memberikan batasan waktu dan jangkauan penelitian ini difokuskan pada studi yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2022 di Kabupaten Kendal.

### 1.8.3 Fenomena Penelitian

Dalam penelitian kualitatif fenomena penelitian memperjelas sifat fenomena, oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran yang realistis tentang situasi saat ini tanpa rekayasa. Fokus fenomena penelitian adalah bagaimana orang mengalami suatu fenomena, bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi pengalaman dalam kehidupan mereka. Peneliti mencoba menggunakan pengalaman informan untuk menggambarkan objek penelitian. Data yang dikumpulkan dengan metode kualitatif menjadi lebih lengkap, lebih dalam, lebih percaya, dan mencakup lebih banyak data dan lebih banyak makna.

### 1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal dalam teks kata verbal yang membentuk teks dengan untaian kata, kalimat, frasa, dan bukan angka (Muhadjir, 1996: 2).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data yang memberikan informasi kepada peneliti secara langsung, menurut Sugiyono (2016: 225). Untuk data utama dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan investasi di Kabupaten Kendal.

Menurut Hasan (2002: 58), data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lain yang sudah ada disebut data sekunder, yang digunakan untuk mendukung informasi primer. Sumber-sumber ini termasuk literatur, bahan pustaka, penelitian sebelumnya, buku, dan sumber lainnya.

#### 1.8.5 Pemilihan Informan

Pemilihan informan menggunakan kriteria pertimbangan akan pemahaman mendalam tentang masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dari berbagai pihak berpartisipasi dalam kerja sama secara langsung dan pihak-pihak yang memberikan dukungan dan berpartisipasi secara tidak langsung.

#### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penjelasan tentang masalah yang diteliti bergantung pada validitas data yang diberikan informan, karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini akan memanfaatkan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber berikut:

##### a. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam konteks ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi, baik yang tertulis maupun dalam

bentuk foto atau gambar, terkait dengan subjek penelitian. Dokumen-dokumen ini terutama mencakup dokumen yang menjelaskan proses investasi dan foto-foto yang menunjukkan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kendal dan investor. Selain itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pencatatan dan pengarsipan berbagai dokumen, termasuk buku, jurnal, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Seluruh dokumen ini berasal dari DPMPTSP Kabupaten Kendal.

b. Wawancara

Dalam hal ini pihak yang akan diwawancara yaitu DPMPTSP Kabupaten Kendal, Bupati Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan wawancara secara tatap muka dan melalui email di internet sebagai metode pengumpulan data. Jika ada masalah, data dapat diunduh melalui situs web pemerintah daerah yang terkait. Hal ini guna memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah valid.

#### 1.8.7 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini diawali dengan menjelaskan masalah berdasarkan data yang ada. Kemudian, hubungan antara fakta-fakta tersebut dievaluasi, dan sebuah kesimpulan ditarik berdasarkan analisis tersebut